



Prof. Muhammad Wildan, M.A., Ph.D.

Tantangan Islamisme dan Masa Depan Pos-Islamisme di Indonesia



Pidato Pengukuhan Guru Besar
Bidang Antropologi Islam

Disampaikan di Hadapan Sidang Senat Terbuka
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

TANTANGAN ISLAMISME DAN MASA DEPAN POS-ISLAMISME DI INDONESIA

Pidato Pengukuhan Guru Besar
dalam Bidang Antropologi Islam
Disampaikan di Hadapan Sidang Senat Terbuka
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta
Kamis, 5 Oktober 2023



Oleh:
Prof. Muhammad Wildan, MA., Ph.D.
Dosen Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023

TANTANGAN ISLAMISME DAN MASA DEPAN POS-ISLAMISME DI
INDONESIA

Prof. Muhammad Wildan, MA., Ph.D.

iii + 63 hlm.; 14,5 x 20,5 cm

Ilustrasi Cover: dari berbagai sumber

www.detik.com

www.youtube.com

www.eramuslim.com

www.jpnn.com

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
Pidato Pengukuhan Guru Besar	
TANTANGAN ISLAMISME DAN MASA DEPAN	
POS-ISLAMISME DI INDONESIA	1
A. Pendahuluan.....	3
B. Pertumbuhan Islam dan Fenomena “Conservative Turn” di Indonesia	8
C. Godaan Islamisme: Sketsa Kedalaman Kepuasan.....	13
D. Kegagalan Islam Politik & Arah Demokratisasi.....	19
E. Syariah sebagai <i>Objective of Meaningfulness</i>	24
F. Pos-Islamisme & Perjuangan Syariah di Era Demokrasi.....	30
G. Secercah Harapan: Terbukanya <i>Relativity and Possibility</i>	35
H. Penutup: Masa Depan Antropologi Islam Indonesia	39
REFERENSI	47
CURRICULUM VITAE	53

**Pidato Pengukuhan Guru Besar
TANTANGAN ISLAMISME DAN MASA DEPAN
POS-ISLAMISME DI INDONESIA**

Assalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Salam sejahtera untuk kita semua

Yang kami hormati,

1. Ketua Senat, Sekretaris Senat, beserta seluruh anggota Senat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Rektor dan para Wakil Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya;
3. Para Dekan & Wakil Dekan di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Dekanat dan para dosen di Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Kepala Pusat Studi, dosen-dosen, dan tenaga kependidikan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
6. Keluarga yang saya cintai, tamu undangan dan hadirin yang saya hormati.

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ. أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرٌ مَمْنُونٍ. صدق الله العظيم أَمَا بَعْدُ

Alhamdulillahillobbi ‘aalamiin

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Yang Maha Rahman dan Rahim, dan memberi kita karunia kesehatan dan kemudahan untuk bertemu pada pagi hari ini. Alhamdulillah, merupakan sebuah kehormatan bagi saya untuk dapat menyampaikan pidato pengukuhan saya sebagai Guru Besar dalam bidang Antropologi Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bapak-ibu, Para hadirin yang berbahagia,

Saya belajar agama selama 6 tahun di Pondok Al-Mukmin Ngruki, yaitu tahun 1983-1989. Waktu yang tidak sedikit untuk mengetahui tentang Islam dan juga ideologi para pendiri pondok yang beberapa waktu yang lalu ini dikenal banyak orang sebagai pesantren yang keras, radikal. Pada saat itu, hubungan Islam dan negara di Indonesia memang sedang memanas karena kasus Asas Tunggal. Para pendiri Pondok Ngruki, Ust. Abdullah Sungkar dan Ust. Abu Bakar Ba’asyir, dua tokoh yang biasa saya temui tahun 1983-1984, juga menjadi korban UU subversif Orde Baru. Saya ingat ada sebagian teman-teman saya mengikuti tarbiyah khusus dan

saya baru tahu di kemudian hari bahwa mereka juga dibaiat untuk ikut harakah di pondok. Setelah lulus, ada 3 teman seangkatan saya studi lanjut ke Pakistan, yang saya tahu kemudian bahwa mereka belajar strategi perang di Akademi Pohantun di Peshawar. Di era reformasi, saya dengar bahwa satu diantara mereka Fathurrohman Alghozi dari Madiun tewas tertembak di Filipina, 1 teman Utomo Pamungkas dari Kulon Progo masih menjalani hukuman seumur hidup di Polda Jakarta, dan 1 lagi dari Bantul baru saja dibebaskan dari penjara Malang. Saya pun masih ingat bahwa ketika lulus dari Pondok Ngruki saya mempunyai ideologi konservatif dan bahkan mungkin ada potensi-potensi ekstremis. IAIN dan sekarang UIN Sunan Kalijaga dan studi lanjut S2 dan S3 telah banyak memberikan pencerahan pada pemikiran saya. Pidato ini merupakan bagian dari komitmen dan tanggungjawab moral saya selama ini untuk terlibat dalam mengarusutamakan Islam moderat dan memberikan alternatif pemikiran bagi kolega-kolega Pondok Ngruki dalam perjuangan Islam mereka.

A.Pendahuluan

Agama dan politik merupakan fenomena yang selalu menarik dan tidak ada habisnya untuk dikaji. Dua hal itu tidak bisa benar-benar dipisahkan, walaupun juga sangat sulit untuk disatukan (An-Na'im: 2007). Di negara-negara Barat yang dikenal sebagai sekuler-pun tidak benar-benar bisa memisahkan urusan agama dan negara. Di negara-negara agama (teokrasi), norma-norma agama juga tidak sepenuhnya digunakan dalam mengatur negara. Dalam banyak kasus, yang terjadi justru

agama sering digunakan untuk kepentingan politik. Penolakan umat Islam Indonesia terhadap negara dan konsep sekularisme sering memunculkan berbagai kasus Islamisme. Pidato ini ingin melihat fenomena maraknya konservatisme dan radikalisme (islamisme) di dunia global dan urgensi konsep pos-islamisme.

Islamisme secara umum didefinisikan sebagai ideologi gerakan sosial-agama yang meyakini bahwa prinsip-prinsip Islam (Syariah) harus diterapkan secara menyeluruh di ranah kehidupan sosial masyarakat dan politik (Bayat, 2005; Roy, 2004). Konsep ini jangan disamakan dengan istilah Islam secara umum yang cenderung dipahami di ranah akademik sebagai apolitis. Di ranah akademik, term islamisme sering juga disebut sebagai Islam politik (Hasan, 2013). Di dalam islamisme, seperti dinyatakan oleh Tibi (2016), Islam dipahami sebagai agama dan negara (*dînun wa daulah*) dan sebagai solusi (*al-Islam huwa al-hâl*) atas ketidakberdayaan umat Islam hari ini. Oleh karenanya, Islam harus ditegakkan secara paripurna baik dalam politik, sosial, ekonomi, dan bidang kehidupan lainnya.

Islamisme merupakan fenomena menarik tidak hanya di ranah global, tetapi juga lokal, Indonesia. Fenomena islamisme sangat menarik untuk dikaji tidak hanya dari perspektif agama, tetapi juga sosial-budaya. Walaupun bukan merupakan fenomena baru, bisa dipastikan bahwa Islamisme mengalami perkembangan seiring dengan globalisasi dan modernisasi. Sejarah Islam Indonesia merekam bahwa Islamisme muncul dan berkembang seiring dengan pembentukan negara-bangsa Indonesia (van Dijk: 1981).

Gerakan Islamisme tidak tunggal, namun terdiri dari berbagai bentuk dan varian. Dalam rentang sejarah Indonesia, fenomena islamisme muncul dalam beberapa spektrum, diantaranya adalah konservatisme, ekstremisme, dan terorisme. Dalam rentang sejarah, penamaan terhadap berbagai fenomena gerakan (Islam) ini di dunia akademik sebenarnya jauh lebih bervariasi seperti fundamentalisme Islam, Islam ortodoks, revivalisme, fanatisme, radikalisme dls. Term islamisme dipandang lebih bisa diterima di kalangan akademisi menggantikan istilah-istilah yang lain. Untuk menyederhanakan pembahasan, saya tidak akan membahas semuanya dan hanya tiga varian tersebut, yaitu konservatisme, ekstremisme, dan terorisme. Secara umum definisi tiga konsep tersebut akan saya jelaskan secara sederhana. Konservatisme adalah kelompok atau varian Islamisme yang menginginkan adanya purifikasi Islam. Ekstremisme adalah varian atau kelompok yang meyakini Islam merupakan ideologi yang mencakup semua aspek kehidupan termasuk politik dan harus diperjuangkan di ranah politik. Sedangkan yang terakhir, terorisme, adalah varian atau kelompok beragama (Islam) yang menginginkan perubahan Islam secara radikal di ranah politik dengan menggunakan kekerasan. Walaupun ideologi Islamisme itu mempunyai akar kuat di dalam negeri, namun pengaruh Islamisme global seperti dari Ikhwanul Muslimin, Al-Qaeda, hingga Islamic State (ISIS) juga sangat signifikan.

Menarik untuk dikaji dari berbagai varian Islamisme tersebut, yaitu norma substansial yang mereka perjuangkan.

Terlepas dari polemik panjang tentang ada-tidaknya dalil *naqli* atau normatif tentang kewajiban mendirikan negara Islam atau negara yang berdasarkan Islam, secara umum tidak banyak yang menafikan kewajiban menjalankan Syariat Islam. Jadi, hampir bisa dipastikan bahwa substansi Islamisme adalah upaya penerapan Syariah Islam. Tentu term dan konsep Syariat Islam juga banyak definisi dan interpretasinya. Semakin banyak konsep Syariat Islam kita pelajari, tentu semakin banyak titik temu yang akan kita temukan.

Bagian terpenting dalam pidato ini adalah konsep pos-islamisme, sebuah konsep yang banyak digagas oleh Oliver Roy dan Asef Bayat. Konsep ini lahir setelah adanya kebuntuan terhadap perjuangan Islam di ranah Islam politik (Islamisme) dan melihat potensi perjuangan Islam yang lebih baik melalui jalur demokrasi (pos-Islamisme). Secara sosiologis bisa diamati bahwa ada pergeseran perjuangan Islam dari orientasi mendirikan negara Islam (*daulah* atau *khilafah*) menuju pemantapan masyarakat Islam (*ummah*).

Tulisan ini juga merupakan perenungan mendasar terhadap konsentrasi major penulis, yakni Antropologi Islam. Sebenarnya kajian Antropologi Islam ini sudah dikaji oleh Abu Raihan Muhammad Al-Beruni (973-1048), Ibn Kaldun, Abdul Hamid el-Zein (1977), Talal Asad (1986), Akbar Ahmed (1986), Wyn Davies (1988) dll. Wyn Davies mengatakan:

“the study of mankind in society from the premises and according to the conceptual orientations of Islam. ... [It is] a social science, concerned with studying mankind in its social communal relations in the diversity of social and cultural settings

that exist around the world today and have existed in the past. The focus of its attention is human action, its diversity of form and institutionalization; it seeks to understand the principles that order, organize and give it meaning" (Wyn Davies 1988: 82, 113).

Sehingga menjadi jelas bagaimana peran agama (*tauhid*) sebagai makna-sentral peradaban masyarakat, terkodifikasi pada sunnah (*hadis, syariah, dan fikih*), menempatkan 'ulama, *ummah, umara* menjadi penopang sistem peradaban, manusia sebagai *nafs* dan manusia sebagai *khilafah*, dan manusia dengan kekuatan fitrah-nya serta agama-nya menjadi faktor dominan pembentuk peradaban yang berkualitas, syariah dan urf memberi kesadaran eksistensial antara parameter yang harus dikerjakan dengan kondisionalitas kontekstualisasinya tanpa menghapus pesan terdalam dari syariah.

Relasi inilah yang kurang dianggap oleh antropolog Barat, mereka lebih memandang Antropologi Islam dalam perspektif sejarah saja, sebagaimana kaum antropologi fungsionalisme seperti Malinowski (Firth, 1957) juga Maslow (1943) memandang kebutuhan dasar (unsur fitrah-fisik) menjadi dasar fungsionalisasi, yang kemudian perlahan berkembang menjadi kebudayaan. Padahal dalam konteks Islam, Tauhid menjadi pokok peradaban manusia.

Hadirin yang berbahagia,

Izinkan saya menggunakan perspektif Antropologi Islam untuk melihat berbagai varian kelompok-kelompok Islamisme di Indonesia dan apa yang mereka perjuangkan khususnya terkait

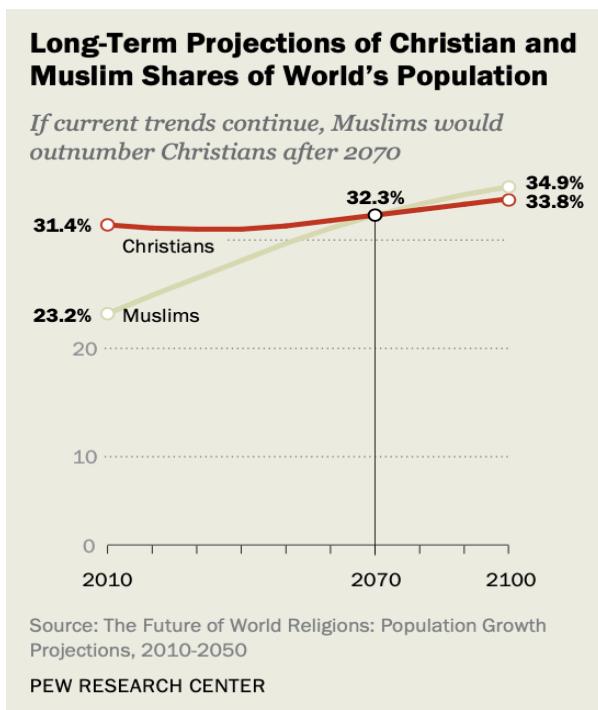
idealisme mereka Syariat Islam. Terakhir, tulisan ini akan melihat sejauh mana Syariat Islam bisa diperjuangkan sebagai nilai-nilai yang universal yang mudah diterima oleh masyarakat umum, khususnya Muslim. Secara umum, tulisan ini melihat perubahan akomodatif (syariah dan *'urf*) bahwa Muslim Indonesia termasuk kelompok-kelompok konservatif akhir-akhir ini lebih bisa menerima demokrasi sebagai bagian dari proses perjuangan Islam mereka. Kaitannya dengan semakin terbukanya interpretasi Syariat Islam, tulisan ini juga ingin menggarisbawahi prospek gerakan pos-Islamisme di Indonesia, sebagai *manifestasi* dari *spirit fulfilling* masyarakat muslim di Indonesia.

B. Pertumbuhan Islam dan Fenomena “Conservative Turn” di Indonesia

Sebagaimana Rodney Stark (2015) dalam bukunya *The Triumph of Faith: Why the World is more Religious than Ever*, kita juga menyaksikan bahwa Islam mengalami perkembangan yang cukup signifikan yang hampir menyamai pertumbuhan agama Kristen. Dibandingkan dengan agama-agama besar yang lain di dunia, Islam diproyeksikan mengalami perkembangan hingga 35% dalam 20 tahun terakhir ini, yaitu 1,6 M (2010) menjadi 2,2 M (2030) (Pew, 2011). Pertumbuhan ini tidak hanya terjadi di negara-negara dengan mayoritas Muslim seperti Indonesia, Pakistan, dan Bangladesh, tapi juga di negeri-negeri Barat, seperti Australia, Amerika, dan negara-negara Eropa. Pola pertumbuhan Islam yang signifikan ini mayoritas dipengaruhi oleh faktor kelahiran (*fertility rate*) secara global yaitu berkisar 1,7% (periode 2010-2020) dan menurun hingga 1,4% (periode 2020-2030). Di Indonesia,

populasi Muslim juga secara konstan terus bertambah seiring dengan pertumbuhan populasi secara umum. Pew Research Center bahkan memprediksikan bahwa jika pertumbuhan Muslim konstan, maka pada tahun 2050 jumlah Muslim terbanyak di dunia akan mengalami pergeseran, yaitu secara berurutan adalah India (310 juta), Pakistan (273 juta), dan Indonesia (256 juta). Selain itu, Pew (2015) juga memprediksi bahwa pada tahun 2070 jumlah populasi Muslim bisa menyamai jumlah populasi umat Kristen.

Gambar 1: Proyeksi Pertemuan Populasi Muslim-Kristen



Sumber: Pew Research Center (2015)

Dari aspek intensitas, umat Islam secara umum juga meningkat secara signifikan. Di era teknologi informasi ini, berbagai macam ideologi global dan lokal saling berkontestasi untuk menyebarkan pengaruh dan memperebutkan pengikut. Pertumbuhan Islam global juga berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi Islam di Indonesia. Oleh karena itulah, hampir semua organisasi keagamaan mengalami dinamika yang cukup tinggi. Beberapa fenomena yang secara mudah menjelaskan kenaikan fenomena ini adalah meningkatnya semangat beragama Islam seperti muncul dan berkembangnya gerakan-gerakan Islam trans-nasional baru seperti gerakan Hizbut Tahrir, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), gerakan Salafi, jaringan Al-Qaeda, jaringan ISIS dan juga semakin maraknya Islam di ranah publik. Fenomena meningkatnya intensitas Islam bisa dilihat dari semakin banyaknya institusi-institusi Islam dan semakin maraknya Islam di ranah publik seperti tumbuhnya perguruan tinggi Islam, pesantren-pesantren, partai-partai Islam, gerakan-gerakan Islam, majelis taklim, keuangan Islam, perbankan Islam, ekonomi hingga konsumerisme Islam. Asef Bayat (2007) menengarai fenomena ini sebagai perubahan masyarakat dari dikotomi *religius* dan *non-religius* menjadi *religious* dan *over-religious* atau *more religious*.

Tidak diragukan lagi bahwa Islam Indonesia mengalami fenomena yang oleh Martin van Bruinessen (2013) sebut sebagai "*conservative turn*". Perubahan ke arah konservatif ini terlihat dari beberapa fenomena yang muncul sejak awal era re-demokratisasi Indonesia seiring dengan pergeseran ke era

milenium. Martin melihat beberapa fenomena konservatisme itu diantaranya adalah lembaga MUI yang sudah banyak dipengaruhi kelompok konservatif dan bahkan Islamis (Hasyim, 2022; Schäfer, 2019), organisasi Muhammadiyah yang juga ada kecenderungan ke arah konservatif, munculnya Komite Persiapan Penerapan Syariah Islam (KPPSI) di Sulawesi Selatan dan juga fenomena konservatisme di kota Solo (Martin, 2013). Untuk aspek Perda Syariah akan saya bahas secara terpisah.

Fenomena populisme Islam seperti kasus 411 dan 212 juga menguatkan fenomena “conservative turn” Indonesia (Hadiz, 2018). Demonstrasi masal namun damai yang terjadi di Jakarta pada 4 November dan 2 Desember 2016 (umumnya disebut sebagai aksi unjuk rasa ‘411’ dan ‘212’) merupakan fenomena penting dalam kancah politik Islam Indonesia. Dugaan penistaan Al-Qur’an oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan pembentukan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) menarik banyak orang untuk berpartisipasi dalam aksi unjuk rasa tersebut. Seperti kita saksikan, banyak elemen masyarakat terlibat dalam aksi damai ini, baik secara organisasional maupun individual. Umat Islam Indonesia yang dalam beberapa aspek terfragmentasi menjadi banyak aliran yang berbeda, bersatu dalam melakukan satu aksi dan satu komando dalam aksi-aksi damai tersebut. Yang paling menarik adalah Habieb Rizieq Shihab, tokoh besar Front Pembela Islam (FPI), yang biasanya berada di pinggiran Islam politik Indonesia, memainkan peran sentral dalam aksi unjuk rasa. Tindakan tersebut membantu menghilangkan

keyakinan lama bahwa umat Islam Indonesia terfragmentasi dan terpolarisasi untuk dapat bersatu (Hadiz, 2018; Wildan, 2016).

Di sisi lain, banyak pengamat Indonesia yang mempertanyakan hubungan antara fenomena aksi damai dengan demokratisasi di tanah air. Aksi unjuk rasa tersebut dapat dianggap sebagai bagian dari proses demokratisasi, yaitu keterwakilan banyak elemen masyarakat di ruang publik. Namun kita juga bisa melihat fenomena ini sebagai fenomena konservatif, yaitu bahwa Islam yang semakin diwakili oleh kelompok Muslim tertentu (Wildan, 2017)

Fenomena *conservative turn* lain di ranah publik yang paling jelas adalah penggunaan kata Syariah di berbagai ranah kehidupan sehari-hari. Di masa Ode Baru kita menyaksikan bahwa penggunaan kata Syariah dianggap tabu dan dianggap sebagai upaya membangkitkan semangat Piagam Jakarta. Saat ini, kata Syariah tidak hanya digunakan dalam institusi keuangan islami seperti bank, asuransi, dan pegadaian Syariah, namun juga hotel, vila, ruang pertemuan, hingga klaster perumahan Syariah. Tidak hanya itu, kata Syariah juga dilekatkan ke sebuah fasilitas atau jasa untuk menambah kesan islami dalam brand bisnis mereka seperti kolam renang Syariah, laundry Syariah, café Syariah, kosmetik Syariah (halal) dll (Fealy: 2008). Walaupun bisa jadi tidak cukup jelas konsep Syariah masing-masing jasa atau brand bisnis tersebut, ini bisa dipastikan sebuah upaya untuk menarik konsumen lebih banyak seiring dengan semakin maraknya re-Islamisasi di negeri ini. Hal ini

identik dengan upaya berbagai bank umum yang membuat badan usaha syariah (BUS) atau unit usaha syariah (UUS) untuk memperebutkan *market share* Syariah yang sejauh ini hanya berkisar 7% (OJK: 2023).

C. Godaan Islamisme: Sketsa Kedalaman Kepuasan

Menurut Scheller, konsep kedalaman kepuasan (*the "depth of contentment"*) adalah pengalaman pemenuhan (*"contentment" is an experience of fulfillment*). Semakin dalam kepuasan yang dihasilkan, semakin tinggi pula nilai tersebut. Kepuasan bukan berarti rasa nikmat secara inderawi melainkan lebih merupakan pengalaman akan kepenuhan batin. Kepuasan ini terjadi hanya jika suatu kecenderungan ke arah nilai terpenuhi lewat perwujudan nilai (Scheller, 1973).

Islamisme bagi masyarakat Islam Indonesia merupakan inspirasi yang tiada henti, karena kata "islamisme" menjadi acuan meraih kedalaman kepuasan menjadi muslim *kaffah* di Indonesia. Walaupun untuk mencapainya banyak rintangan dan kondisional yang tidak kondusif menopang pencapaian tersebut, sehingga keadaan pertumbuhan Islam global dan lokal juga bisa dilihat dari maraknya fenomena Islamisme. Di ranah global, dalam beberapa dekade terakhir muncul gerakan-gerakan Islam konservatif hingga teroris seperti Salafi, Hizbut Tahrir, Al-Qaeda dan hingga ISIS. Sebagai bagian dari Islam global, gerakan-gerakan itu juga berpengaruh di Indonesia. Hampir semua gerakan-gerakan Islamisme tersebut ada dan berkembang di Indonesia. Oleh karena itulah beberapa

gerakan Islam konservatif dan bahkan sebagian cenderung ekstremis-teroris berkembang di Indonesia seperti Front Pembela Islam, FPI (1998), Majelis Mujahidin Indonesia, MMI (2000), penguatan gerakan Jamaah Islamiyah, JI (2000), Jamaah Anshorut Tauhid, JAT (2008), Jamaah Anshorus Syariah, JAS (2014), Jamaah Anshorul Daulah, JAD (2015).

Sebenarnya, pemahaman Islam trans-nasional itu menjadi tantangan dan godaan yang cukup signifikan bagi gerakan-gerakan Islam yang sudah lama membumi di Nusantara. Sebagian pemahaman keagamaan itu membentuk gerakan Islam baru dan sebagian yang lain memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap gerakan yang sudah ada. Kontestasi ideologi ini terjadi cukup signifikan di Indonesia dalam 2-3 dekade terakhir ini. Tidak dipungkiri bahwa pemahaman agama konservatif dan ekstremis juga sudah lama berkembang di Indonesia. Negara Islam Indonesia (NII) atau Darul Islam (DI) yang dideklarasikan oleh S.M. Kartosuwiryo pada 1949 dan mampu bertahan hingga 1962 merupakan bukti konkret keberadaan paham Islam garis keras di negara ini. Pemahaman Islam trans-nasional itu kemudian mempengaruhi dan mengeraskan level islamis-nya. Tidak jarang konservatisme itu berubah menjadi ekstremisme dan bahkan terorisme. Hal itulah yang kemudian mengarah pada asumsi umum yang stigmatik bahwa ekstremisme dan radikalisme itu identik dengan Islam.

Dalam beberapa paragraf berikut ini akan saya deskripsikan dan kategorikan beberapa gerakan Islamis di Indonesia dan kemungkinan adanya pengaruh dari gerakan trans-nasional

mulai dari yang kanan agak tengah, kanan-kanan hingga ekstrem kanan (*far-right extremism*).

Spektrum pertama adalah **konservatisme**. Konservatisme secara umum didefinisikan sebagai ideologi yang ingin mengembalikan Islam ke ajaran atau doktrin Islam yang murni dan menolak interpretasi agama modern, liberal, dan progresif (Bruinessen, 2013). Contoh yang paling dekat dengan spektrum ini adalah gerakan dakwah sekaligus partai politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS), walaupun ada unsur-unsur konservatisme juga pada organisasi-organisasi lain. Organisasi yang dikenal sebagai gerakan tarbiyah ini masuk kategori Islamis(me) karena sebagai organisasi dakwah, juga sebagai partai politik Islam. Ini berarti bahwa partai ini mempunyai agenda untuk membawa nilai-nilai Islam di ranah politik. Berawal dari Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSLD) dan dideklarasikan pada 20 Juli 1998, Partai Keadilan (PK) kemudian bermetamorfosis menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada 2003 karena persyaratan *electoral threshold*. Secara genealogis dan ideologis, keberadaan PKS merupakan pengaruh dari gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Hal ini dibuktikan dengan para pendirinya yang rata-rata merupakan alumni dari beberapa universitas di Timur Tengah (Machmudi, 2008). Namun, beberapa pengamat “mencurigai” partai ini mempunyai “hidden agenda” karena keberadaan Hilmi Aminuddin (pernah sebagai ketua Majelis Syuro PKS), yang merupakan anak dari Danu Muhammad Hasan (tokoh penting dalam gerakan Negara Islam Indonesia, NII). Contoh lain spektrum ini adalah Partai Bulan Bintang (PBB). Karena

eksistensi partai ini dalam beberapa tahun terakhir tidak cukup signifikan, maka partai ini tidak akan dibahas di sini secara luas.

Spektrum kedua adalah **ekstremisme**. Secara umum ekstremisme didefinisikan sebagai kelompok yang meyakini Islam merupakan ideologi yang mencakup semua aspek kehidupan termasuk politik dan harus diperjuangkan di ranah politik. Gerakan yang secara tepat sebagai contoh untuk gerakan ini salah satunya adalah Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). MMI didirikan di Yogyakarta pada tahun 2000 di oleh Irfan S. Awwas, M. Sobbarin Syakur, Fihiruddin Muqti (Abu Jibril) dan beberapa aktivis tokoh garis kanan pada masa Orde Baru. Berbeda dengan varian konservatif yang cenderung kurang jelas konsep dan roadmap Syariahnya, varian ekstremisme jelas mengagendakan Syariah sebagai tujuan utama gerakan tersebut (Hamijaya & Awwas, 2023). Walaupun demikian, MMI berdiri bukan karena pengaruh dari gerakan trans-nasional, tapi murni sebagai gerakan lokal. Ketika ISIS dideklarasikan tahun 2014, dengan jelas MMI menolak dan tidak setuju dengan gerakan garis keras dari Suriah tersebut. Gerakan lain yang masuk kategori ekstremisme adalah Front Pembela Islam (FPI), Jamaah Anshorus Syariah (JAS). Ideologi yang menyatukan mereka adalah agenda Syariah dalam gerakannya.

Spektrum terakhir dan paling kanan adalah **terorisme**. Secara umum terorisme didefinisikan sebagai varian atau kelompok Islam yang meyakini bahwa (Syariat) Islam harus diperjuangkan dengan menggunakan kekerasan (*violence*). Gerakan Islam yang paling tepat masuk kategori ini adalah

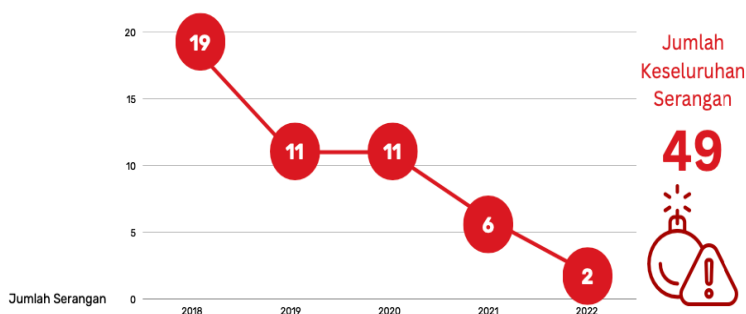
Jamaah Islamiyah (JI). Gerakan ini didirikan pada 1995 merupakan friksi dari NII; Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir memisahkan diri dari NII-nya Ajengan Masduki. Gerakan ini berdiri dan berkembang di luar negeri, ketika kedua tokoh tersebut dalam pengasingan di Malaysia. JI juga mengalami penguatan karena JI juga mengorganisir banyak pemuda Indonesia untuk belajar strategi dan praktik perang di Afghanistan. Berbeda dengan NII yang tidak banyak mempunyai jaringan luar negeri, pengalaman JI di Malaysia dan Afghanistan memudahkannya dalam mengembangkan jaringan di Asia Tenggara dan bahkan di Australia (ICG, 2002; IPAC, 2017).

Runtuhnya rezim Orde Baru dan munculnya era reformasi merupakan *political opportunity structure* bagi gerakan-gerakan Islam garis kanan untuk lebih berkembang di wilayah Indonesia dan bahkan lebih radikal. Terlepas dari sanggahan beberapa oknum bahwa bom-bom teror awal era milenium tidak dilakukan oleh JI, ekstremisme kekerasan tersebut bisa jadi dilakukan oleh oknum-oknum JI secara individual. Diawali dengan bom Natal (2000) yang meledak di beberapa gereja, JI kemudian melancarkan serangan yang lebih destruktif dengan skop yang lebih luas. Secara berurutan beberapa bom destruktif diantaranya adalah Bom Bali I (2002), bom JW Marriot (2003), Bom Kedutaan Australia (2004), bom Bali II (2005), bom Mega Kuningan (2009) dll. Setelah itu seiring dengan tindakan aparat keamanan yang cukup cepat, kasus-kasus ekstremisme kekerasan cenderung berkurang baik dari sisi kuantitas maupun intensitas; serangan terorisme cenderung berskala kecil atau

bahkan individual (*lone wolf*). Gerakan Islam lain yang masuk varian terorisme adalah Jamaah Anshorut Tauhid (JAT), Jamaah Anshorud Daulah (JAD) dls. Beberapa ekstremisme kekerasan yang dilakukan oleh kedua gerakan ini diantaranya adalah bom Sarinah (2016), tragedi Mako Brimob (2018), bom gereja Surabaya (2018), bom gereja Katedral Makassar (2021).

Perlu sedikit dipetakan bagaimana kondisi terorisme Indonesia dibandingkan dengan kondisi global. Secara umum bisa digambarkan bahwa puncak terorisme atau ekstremisme kekerasan di Indonesia adalah sekitar tahun 2009 dan cenderung menurun setelah tahun itu. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor diantaranya adalah kesigapan aparat dalam penindakan kasus-kasus terorisme, keterlibatan organisasi masyarakat sipil (OMS), dan menguatnya kelompok moderat.

Gambar 2: Serangan Fisik 2018-2022



Grafik 1. (BNPT, Subdit Hubal, Direktorat Penegakan Hukum, 2023)

Sumber: BNPT (2023)

D. Kegagalan Islam Politik & Arah Demokratisasi

Membaca kegigihan berbagai kelompok Islam dalam memperjuangkan nilai-nilai Islam yang diyakininya, penulis merujuk pada Max Scheller (Perin, 1991), untuk menjelaskan daya dorong tersebut guna memenuhi kebermaknaan (*fulfilling-meaningfulness*), yakni nilai (Max Scheler. 1973: 105-108):

a. Nilai-nilai kesenangan

Nilai-nilai kesenangan berada pada tingkat yang paling rendah. Tingkatan ini berkaitan dengan fungsi dari perasaan inderawi yaitu rasa nikmat dan rasa sakit atau pedih. Nilai kesenangan dan kesusahan, atau kenikmatan dan kepedihan adalah deretan nilai yang dapat ditemukan pada tingkatan ini.

b. Nilai-nilai vitalitas atau kehidupan

Menurut Scheler nilai vitalitas berada di tingkatan selanjutnya, di atas nilai kesenangan. Nilai vitalitas terdiri dari nilai-nilai rasa kehidupan yang meliputi luhur, halus, lembut, dan kasar. Nilai yang mencakup dalam tingkatan ini meliputi kesejahteraan pada umumnya.

c. Nilai Spiritual

Tingkatan di atas nilai vital adalah nilai spiritual. Nilai spiritual dapat ditangkap dengan rasa spiritual dan dalam tindakan preferensi spiritual yaitu mencintai dan membenci. Jenis pokok dari nilai spiritual adalah nilai estetis (berkaitan dengan indah dan buruk), nilai benar dan salah atau nilai adil dan tidak adil.

d. Nilai-nilai kesucian dan keprofanan

Posisi tertinggi dalam hierarki nilai adalah kesucian. Nilai kesucian hanya tampak pada kita sebagai objek absolut. Tindakan yang terjadi dalam mencapai nilai kekudusan adalah suatu jenis cinta khusus yang secara hakiki terarah pada pribadi. Tanggapan yang dapat diberikan terhadap tingkatan nilai spiritual ini yaitu beriman dan tidak beriman, kagum, memuji dan menyembah. Keadaan perasaan yang berkaitan dengan nilai-nilai ini adalah rasa terberkati atau diridhoi dan putus harapan yang mencerminkan serta mengukur pengalaman manusia akan kedekatan serta jaraknya dari yang suci.

Hadirin yang saya hormati,

Antropologi Islam mendapat penjelasan dari Max Scheller terkait alasan mendasar mengapa umat Islam selalu menggebu menegakkan tauhid dan syariah. Ternyata menurut Scheller, kegigihan tersebut merupakan Kebaikan Moral. Kebaikan Moral adalah keinginan untuk mewujudkan nilai yang lebih tinggi atau nilai yang tertinggi. Tindakan baik secara moral adalah tindakan mewujudkan nilai yang lebih tinggi dan menolak nilai yang lebih rendah. Sebaliknya, tindakan jahat adalah tindakan yang menolak nilai yang lebih tinggi dan mewujudkan nilai yang lebih rendah. Inilah yang menjadi daya gerak (*driven*) jatuh-bangunnya peradaban dalam Islam. Daya gerakan ini kemudian penulis sebut *Spirit-Fulfilling*.

Apa yang Scheller sampaikan, mekanismenya dapat penulis amati pada beberapa dekade terakhir, dunia Islam

telah menyaksikan perubahan politik yang signifikan. Salah satu fenomena yang terjadi adalah berkembangnya gerakan politik yang mengusung Islam sebagai basis ideologinya. Namun, seiring dengan perkembangannya, gerakan Islam politik juga telah menghadapi sejumlah kegagalan yang patut diperhatikan. Namun demikian, masih ada secercah harapan karena munculnya demokratisasi dan menguatnya kelompok moderat, termasuk di negara Indonesia.

Salah satu kegagalan yang dapat diamati adalah ketidakmampuan gerakan Islam politik untuk menciptakan stabilitas politik dan kemajuan sosial yang berkelanjutan di beberapa negara Islam. Beberapa faktor yang memengaruhi kegagalan ini antara lain fragmentasi dan perpecahan di dalam gerakan itu sendiri, ketidakmampuan dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial. Gerakan ini ditandai dengan protes massa, unjuk rasa, dan perubahan rezim yang ditujukan untuk menggulingkan pemerintahan otoriter yang telah berkuasa selama bertahun-tahun. Olivier Roy (1994) menengarai bahwa kegagalan Islam politik karena terlalu menekankan identitas agama dan memperjuangkan tujuan yang bersifat eksklusif, yang sering kali mengabaikan prinsip-prinsip inklusif dan keragaman yang merupakan bagian utuh dari demokrasi. Hal ini dapat menciptakan polarisasi dan konflik sosial di masyarakat. Lebih lanjut Olivier Roy membahas bagaimana gerakan Islam politik terkadang gagal dalam menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Berbagai gerakan Islamis cenderung menekankan nilai-nilai agama yang eksklusif dan mengabaikan berbagai aspek sosial dan budaya.

Gerakan-gerakan islamis ini cenderung mengaplikasikan konsep agama secara normatif seperti konsep *dârul Islam*, *dârul harbi*, *khilâfah* bahkan takfiri dan mengabaikan aspek politik, sosial, dan budaya yang berpotensi membawa perubahan masyarakat yang lebih Islami.

Namun, di tengah kegagalan gerakan Islam politik, terdapat juga perkembangan yang menarik, yaitu berkembangnya demokratisasi di dunia Islam. Beberapa negara berpenduduk mayoritas Muslim mengalami demokratisasi (di dunia Arab dikenal dengan Arab Spring, yaitu proses yang melibatkan partisipasi publik, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, serta akuntabilitas pemerintah. Arab Spring muncul sebagai respons terhadap penindasan politik, korupsi, ketidaksetaraan ekonomi, dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di berbagai negara di wilayah tersebut.

Meskipun tidak sepenuhnya sempurna, perkembangan ini menunjukkan kemajuan penting dalam mengakomodasi keberagaman masyarakat dan memperkuat partisipasi politik. Perubahan ini telah tercermin dalam sejumlah negara di dunia Islam seperti di Tunisia, Mesir, Libya, dan Yaman. Beberapa negara tersebut telah mengalami transformasi politik yang signifikan menuju sistem yang lebih demokratis. Walaupun demikian, tidak sedikit negara-negara di Timur Tengah yang mengalami protes dan demonstrasi besar tapi tidak berhasil mengadakan perubahan ke arah demokratisasi (Hadiz, 2016).

Berkembangnya demokratisasi di dunia Islam menunjukkan bahwa terdapat keinginan yang kuat di kalangan masyarakat Muslim untuk memiliki pemerintahan yang lebih adil, terbuka,

dan mengutamakan kesejahteraan. Hal ini juga menunjukkan bahwa nilai-nilai demokrasi tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, melainkan dapat disinkronkan dengan prinsip-prinsip agama yang mendorong keadilan sosial dan keberpihakan terhadap kaum yang tertindas. Pentingnya pengembangan demokratisasi di dunia Islam dapat dilihat sebagai solusi jangka panjang terhadap kegagalan gerakan Islam politik. Dengan memperkuat institusi-institusi demokrasi, mempromosikan partisipasi politik yang inklusif, dan membangun keadilan sosial, masyarakat Muslim dapat menciptakan sistem politik yang berdaya guna dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada warganya.

Di Indonesia, fenomena demokratisasi itu bisa dilihat pada menguatnya kelompok Muslim moderat. Ada beberapa faktor yang mendukung asumsi ini. *Pertama*, akses terhadap informasi dan pendidikan yang lebih luas telah mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap agama. Dengan kemajuan teknologi dan akses yang lebih mudah ke berbagai sumber informasi, masyarakat Indonesia, khususnya Muslim, telah terbuka terhadap berbagai perspektif agama. Hal ini memungkinkan individu untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas tentang agama mereka dan melihat Islam sebagai agama yang inklusif dan toleran. *Kedua*, maraknya keinginan masyarakat untuk menjaga harmoni dan kerukunan antaragama. Sebagai negara yang kaya akan keragaman budaya, masyarakat Muslim akhir-akhir ini lebih sadar akan pentingnya kerukunan antar umat beragama. Kelompok Muslim moderat memainkan peran penting dalam mempertahankan kerukunan ini dengan

menekankan pada nilai-nilai toleransi, inklusivitas, dan saling menghormati antaragama. *Terakhir*, para pemimpin agama dan intelektual Muslim moderat juga berperan penting dalam menguatkan kelompok ini. Pemimpin-pemimpin agama yang berpegang pada nilai-nilai Islam yang moderat dan inklusif, serta intelektual Muslim yang mempromosikan pemahaman yang lebih rasional dan kontekstual tentang Islam, telah memberikan arahan dan kepemimpinan yang kuat dalam mengembangkan kelompok Muslim moderat di Indonesia. Melalui pesan-pesan agama di berbagai forum, mereka telah menginspirasi masyarakat untuk mengadopsi sikap moderat dalam beragama. Keberadaan organisasi masyarakat seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah merupakan kunci terhadap sikap moderatisme Muslim Indonesia.

E. Syariah sebagai *Objective of Meaningfulness*

Tuntutan sebagian Muslim Indonesia yang menyerukan penerapan Syariah¹ dalam struktur hukum negara akhir-akhir tampaknya cukup mengejutkan dan mengkhawatirkan banyak pihak. Tuntutan dan aksi-aksi yang mengarah ke Syariah tersebut sering dicirikan sebagai indikasi 'Islamisasi' atau 'syarianisasi' negara dan masyarakat Indonesia. Untuk menilai secara obyektif

¹Penting untuk ditekankan di sini bahwa term Syariah dalam konteks Indonesia harus dipahami secara lebih komprehensif. Syariah yang dipahami secara umum oleh Muslim di Indonesia lebih dekat dengan arti fikih, dan bukan implementasi syariah sebagai *qanun*. Abdullahi Ahmed An-Na'im menengarai kasus di Indonesia ini dengan menyebutnya sebagai syariah (dengan s kecil) berarti orientasi pada fikih dan Syariah (dengan S kapital) berarti orientasi pada penerapan Syariah sebagai *qanun*, atau totalitas beragama Islam. Lihat An-Naim, 2007: 416.

terhadap tren ini, kita perlu mempertimbangkan perbedaan dan identitas sosial yang mendalam antara komunitas mayoritas Muslim dan minoritas non-Muslim di Indonesia, serta persaingan dan konflik yang telah berlangsung puluhan tahun (dan koalisi pragmatis sesekali) antara elite sekuler dan agama.

Untuk itu, kita perlu mempertimbangkan pembentukan identitas dan politik masyarakat untuk memahami mengapa para pemimpin agama saat ini bersemangat dan mampu memobilisasi populasi Muslim biasa dalam skala besar atas nama agama (Islam). Penting untuk digarisbawahi bahwa tidak ada hal yang baru dalam tuntutan umat Islam, baik dalam menyerukan taat terhadap syariah atau permusuhan terhadap non-Muslim (terutama etnis Tionghoa dan Kristen).

Sejak awal Indonesia modern, Islamisme selalu menjadi kekuatan politik yang kuat dalam rangka meningkatkan posisi agama mayoritas – Islam – dalam struktur negara dan hukum yang baru muncul. Para elite agama Islam (ulama atau kiai) dan gerakan Islam, termasuk NU dan Muhammadiyah, menuntut agar konstitusi republik baru ini mengabadikan dan menjamin hak umat Islam untuk mematuhi syariah, yang termaktub dalam Piagam Jakarta. Tuntutan-tuntutan ini diajukan terutama untuk mencapai posisi superior bagi mayoritas Muslim dalam konstitusi dan negara di negara berkembang yang terpecah belah.

Dalam beberapa dekade berikutnya, para pemimpin agama yang bercita-cita dan berjuang untuk meningkatkan posisi tawar Islam dalam negara dan identitas nasional justru kalah secara konstitusional dan politik (perlu referensi). Di bawah rezim sekuler dan otoritarian Presiden Sukarno dan Suharto,

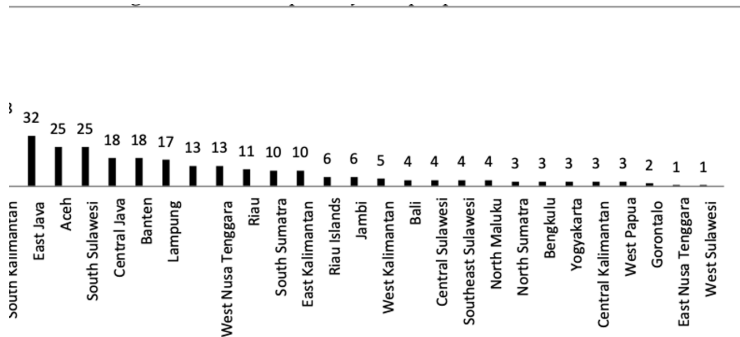
Islamis dan beberapa pemimpin Muslim secara sosial dan politik dicap sebagai musuh negara kesatuan republik. Tidak sedikit para tokoh Islam dijuluki sebagai neo-NII atau radikal karena memperjuangkan syariah di level negara. Pada tahap selanjutnya, mayoritas para pemimpin Islam menggunakan jalur kompromi dan menerima Pancasila sebagai common values dan mundur dari politik formal. Ketika Nurcholish Madjid mengeluarkan pernyataan “Islam Yes, Politik No”, pada era yang sama HAMKA akhirnya ‘terpaksa’ menerima sebagai ketua MUI, Muhammad Natsir mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) setelah dibubarkannya Masyumi oleh pemerintah. Saya masih ingat statemen M. Natsir saat itu, “Dulu kita berdakwah di jalur politik, sekarang kita berpolitik di jalur dakwah”.

Demokratisasi Indonesia juga ditandai dengan munculnya semangat konservatisme di banyak kota dengan munculnya berbagai peraturan daerah (perda) Syariah. Dani Muhtada (2014) menengarai jumlah perda syariah dari 1999 hingga 2013 ada sekitar 422 perda yang tersebar di 29 provinsi dan 174 kabupaten. Tujuh provinsi yang cukup dominan mengeluarkan perda Syariah secara berurutan adalah Jawa Barat (86), Sumatera Barat (54), Kalimantan Selatan (38), Jawa Timur (32), Aceh (25), Sulawesi Selatan (25), Jawa Tengah (18), dan Banten (18). Diantara provinsi-provinsi lain di Jawa, daerah Istimewa Yogyakarta diantara yang paling sedikit mengeluarkan perda Syariah, yaitu hanya 3 buah. Menarik untuk diidentifikasi lebih lanjut bahwa diantara 422 perda Syariah tersebut, 40% diantaranya berkaitan dengan moralitas, 15% tentang zakat, 14% keimanan, 9% tentang keuangan Islam, 6% tentang

pendidikan Islam, 6% tentang busana Muslim, dan 10% lain-lain.

Dinamika implementasi Syariat Islam di Aceh juga menarik untuk sedikit disinggung di sini. Syariat Islam di Aceh terus diperjuangkan oleh umat Islam sebagai bagian dari kompromi politik sejak kemerdekaan Indonesia. Penerapan hukum Islam dalam konteks negara demokrasi Indonesia sudah sesuai dengan tata cara pembentukan hukum (*siyāsah tasyrī'iyah*) dalam sistem hukum dan politik nasional. *Roadmap* penerapan syariah di Aceh meliputi bidang hukum keluarga (*al-ahwāl al-syakhsiyyah*), hukum pidana (*ahkām al-jināyāt*), hukum ekonomi (*ahkām al-mu'āmalāt*), merupakan contoh perjuangan Syariah di ranah negara demokrasi. Aceh memang bukan prototipe negara Islam, tapi Aceh akan selalu menjadi provinsi negara Indonesia yang menerapkan prinsip-prinsip Islam berdasarkan mekanisme demokrasi. Peraturan yang diberlakukan ini bermakna bahwa hukum Islam di Aceh telah menjadi hukum yang diterima oleh masyarakat Aceh dan secara lebih luas masyarakat Indonesia (Zada, 2023).

Gambar 3: Distribusi Perda Syariah Per-Provinsi



Sumber: Dani Muhtada (2014)

Demokratisasi Indonesia sejak jatuhnya Suharto pada tahun 1998 cenderung tidak banyak mengubah posisi subordinat Muslim dalam struktur kekuasaan dan ekonomi negara didominasi oleh elite bisnis non-Muslim (terutama Cina). Kenyataannya, demokratisasi Indonesia telah memberikan peluang bagi kelompok-kelompok minoritas untuk mendapatkan status dan posisi lebih baik oleh para presiden pluralis pro-minoritas: Abdurrahman Wahid, Megawati Sukarnoputri, dan Joko Widodo. Hasilnya, umat Islam yang selama ini merasa sebagai mayoritas seolah tidak mendapatkan hak dan statusnya sebagai mayoritas dan bahkan termarginalkan. Kondisi ini kemudian diperburuk dengan kasus penistaan Ahok yang menjadi momentum menguatnya Islamisme karena adanya “common enemy”. Beberapa pengamat bahkan cenderung menamai fenomena ini sebagai *majority in quantity but minority in mentality*.

Dalam konteks inilah maka gaung dan tuntutan Syariah semakin menguat. Namun demikian, tampaknya fenomena ini lebih merupakan riak-riak kecil dalam arus besar demokratisasi. Sebagaimana analisa Azyumardi Azra (2020), kelompok moderat terlalu kuat untuk gagal, demokratisasi di Indonesia akan terus semakin menguat. Hal ini juga tampak dalam slogan Habib Rizieq dalam Milad FPI 2019 sebelum dibubarkan oleh pemerintah dengan istilah NKRI Bersyariah.

Gambar 4: Pendukung Penerapan Syariah di Indonesia

Most Muslims surveyed favor sharia as official law in their country or area

% of Muslims in each country who favor making sharia the official law of the land in their country/in the areas where Muslims are a majority

Muslim-majority countries

Malaysia	86%
Indonesia	64

Other countries

Sri Lanka	71
Thailand	67
Singapore	63

Note: This question was not asked in Cambodia. Respondents in Indonesia and Malaysia were asked, "Do you favor or oppose making sharia the official law of the land in [COUNTRY]?"

Respondents in Singapore, Sri Lanka and Thailand were asked, "Do you favor or oppose making sharia the official law of the land in the areas where Muslims are a majority?"

Source: Survey conducted June 1-Sept. 4, 2022, among adults in six South and Southeast Asian countries. Read Methodology for details. "Buddhism, Islam and Religious Pluralism in South and Southeast Asia"

PEW RESEARCH CENTER

Sumber: Pew Research Center (2023)

Secara sederhana, dapat dipahami jika gerakan syariatisasi pada semua lini kehidupan sosial politik di Indonesia merupakan tujuan objektif dari masyarakat Islam Indonesia mewujudkan kebermaknaan (*meaningfulness*) optimal guna pencapaian nilai profanik secara konsisten dan komprehensif (*kaffah*). Hal tersebut senada dalam QS. Al-Baqarah: 208 yang artinya "Hai orang-orang yang beriman masuklah kami sekalian ke dalam

Islam secara kaffah”.

Inilah yang menjadi alasan kuat, jatuh banggunya masyarakat Islam Indonesia membangun peradaban Islam akan selalu berhadapan dengan kejahatan moral, yakni kekuatan yang selalu menahan masyarakat Islam hanya puas pada pencapaian nilai titik terendahnya, yakni nilai kesenangan atau *utility values*. Kejahatan moral memenjarakan masyarakat Islam Indonesia euforia pada identitas dan golongan saja, sehingga memudahkan untuk diadu domba.

F. Pos-Islamisme & Perjuangan Syariah di Era Demokrasi

Kegagalan Islam politik di dunia mayoritas Muslim telah mendorong para sarjana dan pengamat mengajukan sebuah konsep baru yang menyatukan Islam dan demokrasi, dua entitas yang pada awalnya banyak orang pesimis, yaitu pos-Islamisme. Pos-Islamisme merujuk pada gerakan politik atau ideologi yang mengusung agama Islam sebagai landasan utama dalam upaya mempengaruhi atau mengubah sistem politik. Pos-Islamisme muncul sebagai respons terhadap perkembangan modernisasi dan globalisasi yang dianggap memberikan pengaruh negatif terhadap identitas dan nilai-nilai Islam. Pos-Islamisme memberikan sebuah alternatif perjuangan Syariah Islam di negara-negara sekuler seperti Indonesia (Bayat, 2007).

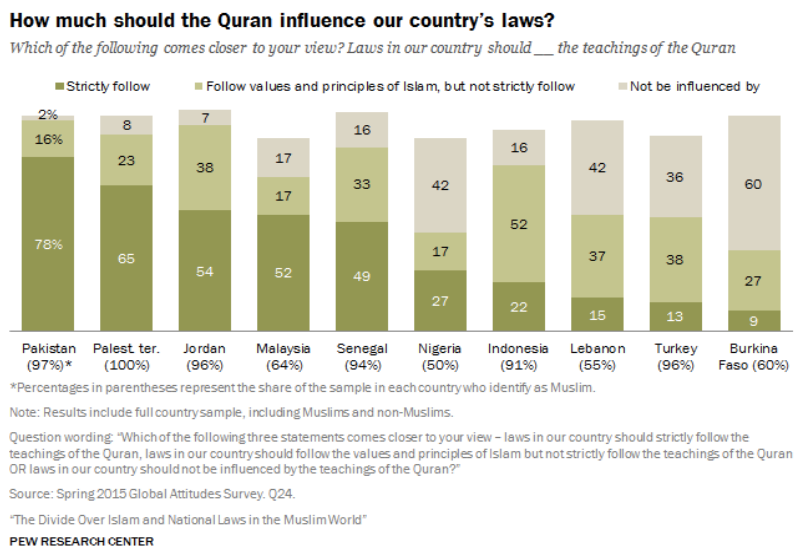
Titik temu antara nilai-nilai Islam dan demokrasi telah menjadi topik yang memikat perhatian banyak kalangan di dunia modern saat ini. Secara umum, ada beberapa aspek Islam yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi, seperti

keadilan, persamaan, partisipasi, dan kebebasan individu. Secara keseluruhan, Islam dan demokrasi dapat dianggap memiliki nilai-nilai yang dapat saling melengkapi dan ko-eksis di dalam konteks negara seperti Indonesia. Negara Indonesia, Tunisia, dan Malaysia adalah contoh konkret ko-eksistensi antara nilai-nilai Islam dan demokrasi. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia telah berhasil menjalankan sistem demokrasi yang inklusif dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip Islam yang diakui dan dihormati. Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, mencakup prinsip-prinsip keadilan sosial yang sejalan dengan ajaran Islam, seperti keadilan, persamaan, dan kesejahteraan sosial.

Meskipun pos-islamisme mengusung agenda agama (Islam) dalam politik, arah demokratisasi di Indonesia telah memainkan peran penting dalam mempengaruhi dinamika politik negara ini. Sejak jatuhnya rezim otoriter pada 1998, Indonesia telah mengalami proses demokratisasi yang signifikan. Pemilihan umum yang bebas dan adil diadakan secara teratur, lembaga-lembaga demokratis seperti partai politik, parlemen, dan lembaga yudikatif berkembang, dan kebebasan berpendapat serta kebebasan media semakin dihormati. Namun, arah demokratisasi di Indonesia juga menghadapi tantangan. Pos-islamisme sering kali menimbulkan pertentangan antara prinsip demokrasi dan penegakan Syariat Islam. Beberapa kelompok islamis menyerukan implementasi hukum Islam secara ketat dan memperjuangkan penggunaan agama sebagai dasar hukum negara. Hal ini menciptakan

ketegangan antara mereka yang ingin melindungi kebebasan beragama (toleransi dan pluralisme) dan hak asasi manusia dengan mereka yang ingin memperkuat identitas dan nilai-nilai Islam dalam kehidupan politik. Tidaklah mengherankan bila hasil survei Pew Research Center menghasilkan data bahwa 91% Muslim Indonesia meyakini bahwa Alqur'an harus berpengaruh terhadap hukum negara (2015).

Gambar 5: Pendukung Al-Qur'an harus berpengaruh terhadap hukum negara



Sumber: Pew Research Center (2015)

Meskipun demikian, mayoritas masyarakat Indonesia masih menginginkan sistem politik yang inklusif dan memperhatikan

hak-hak individu. Mereka menginginkan harmoni antara Islam dan demokrasi, di mana agama dapat berfungsi sebagai sumber inspirasi dalam kehidupan politik tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip dasar demokrasi seperti pluralisme, toleransi, dan kebebasan sipil. Seiring dengan proses demokratisasi yang berkelanjutan, penting bagi Indonesia untuk terus membangun konsensus dan dialog antara berbagai kepentingan politik dan agama agar dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi semua pihak (An-Na'im, 2007). Selain itu, Indonesia juga telah menerapkan konsep demokrasi dalam pengambilan keputusan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Prinsip musyawarah dan mufakat, yang merupakan bagian dari tradisi Islam, diintegrasikan ke dalam sistem politik Indonesia.

Di Indonesia, pos-islamisme dapat dilihat dalam berbagai bentuk, mulai dari partai politik Islamis seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Amanah Nasional (PAN). Partai-partai tersebut secara terbuka mempromosikan prinsip-prinsip Islam dalam platform politik mereka, sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip demokrasi dan kebebasan berekspresi. Dengan demikian, Indonesia memberikan contoh yang kuat tentang bagaimana nilai-nilai Islam dan demokrasi dapat bersatu dan saling melengkapi. Melalui ko-eksistensi yang harmonis antara Islam dan demokrasi, Indonesia telah membangun fondasi yang kuat untuk mewujudkan keadilan, partisipasi, dan kesejahteraan

bagi seluruh warga negara, sambil tetap mempertahankan identitas dan nilai-nilai Islam yang kaya dan bermakna.

Di wilayah praksis, berbagai partai dengan identitas Islam tersebut berkontribusi positif terhadap terbentuknya beberapa undang-undang dan atau peraturan pemerintah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Beberapa undang-undang atau hukum positif Indonesia yang bersumber dari agama Islam yang telah diperjuangkan dengan prinsip konstitusional atau melalui jalur demokrasi diantaranya adalah: UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan (Bank Umum dan Syariah), UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan (Implementasi Bank Syariah), UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Kepres No. 38 tahun 2001 tentang BAZNAS, UU No. 20 tahun 2002 tentang Pendidikan Agama, UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, UU No. 13 tahun 2008 Penyelenggaraan Ibadah Haji, UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi dan Pornoaksi, dan UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Farkhani dkk. 2022). Ini semua bisa dianggap sebagai keberhasilan umat Islam Indonesia yang diperjuangkan di ranah politik. Inilah outcome pos-Islamisme.

Walaupun demikian, berbagai kelompok konservatif belum melihat berbagai hukum positif Islam di atas sebagai sebuah keberhasilan di ranah politik. Secara umum berbagai kelompok Islam konservatif melihat Syariat Islam lebih pada aspek hukum

pidana seperti *hudud* dan *qishash* dan kurang melihat aspek ibadah, munakahat, dan mu'amalah sebagai bagian utuh dari Syariat Islam. Fenomena ini juga membuktikan bahwa nilai-nilai Islam bisa diperjuangkan di ranah politik Indonesia. Jadi walaupun Indonesia dikenal sebagai negara sekuler, tapi sebenarnya tidak benar-benar sekuler. Negara masih mempunyai peran yang cukup signifikan dalam mengurus aspek agama. Ini juga sebuah harapan bagi kelompok-kelompok Islam konservatif yang mungkin selama ini pesimis dalam memperjuangkan Islam di ranah politik.

G. Secercah Harapan: Terbukanya *Relativity and Possibility*

Pada bagian ini, penulis ingin menjelaskan jika syariah menjadi alasan dasar masyarakat Islam membangun peradaban sekaligus relasi antar peradaban, sehingga membangun *share of meaningfulness* tidaklah mudah. Karena pada kehidupan nyata berhadapan dengan kondisionalitas (*al-'urf*) yang selalu dinamis. Pada kondisi tersebut masyarakat Islam pun harus segera menyadari diri me-reorientasi kebaikan moral tertinggi, yakni meloncat meraih kebutuhan transenden, tidak terkurung pada kebaikan moral yang rendah. Hal ini menjadi alasan mengapa masyarakat Islam Indonesia tidak dapat membangun peradaban tinggi, karena selama ini mereka terjebak pada kepuasan berada pada level dasar kebaikan moralnya, dan mereka dikondisikan oleh kekuatan yang berusaha memenjarakan Masyarakat muslim hanya bangga dengan identitas dan golongan saja, tetapi mereka

melupakan rancangan bangun kebaikan moral tertingginya, yakni peradaban berbasis transenden.

Demokrasi merupakan sistem pembentuk *relativity and possibility*. Setidaknya bagi masyarakat Islam Indonesia ketika mereka berkehendak menegakkan tauhid dan syariah secara *kaffah* dalam kehidupan publik. Demokrasi memang tidak menjanjikan apa-apa, akan tetapi demokrasi menjadi *possibility* pencapaian tingkat kebaikan moral relatifnya (*“the level of the “relativity of values,” or their relationship to “absolute values”*), akan selalu terbuka.

Karena itulah di Indonesia, demokrasi belum sepenuhnya diterima oleh umat Islam khususnya kelompok konservatif. Namun beberapa fenomena dalam 5 tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Berbeda dengan pemilu atau pilkada sebelumnya dimana kelompok-kelompok konservatif cenderung golput, pilkada 2018 khususnya pilgub di Jawa Tengah menandai perubahan itu. Calon gubernur dan wakil gubernur Sudirman Said dan Ida Fauziyah yang diusulkan oleh koalisi PKB, Gerindra, PKS dan PAN mendapatkan respons yang sangat positif di kalangan Muslim tradisional dan juga kelompok atau kantong-kantong konservatif. Walaupun akhirnya pilgub dimenangkan oleh Ganjar Pranowo dan Taj Yasin Maimoen yang merupakan hasil koalisi partai PDI-P, Golkar, Demokrat, PPP, dan NasDem, fenomena ini menarik untuk dikaji. Penulis mengamati bahwa di kantong-kantong konservatif seperti Pondok Ngruki menunjukkan antusiasme yang cukup tinggi untuk memilih

Sudirman-Ida. Kesadaran publik termasuk kelompok-kelompok konservatif terhadap urgensi politik ini menunjukkan ada perubahan lanskap politik.

Fakta di atas diperkuat dengan beberapa fenomena lain dalam beberapa tahun terakhir ini. Beberapa kelompok konservatif dan bahkan cenderung ekstremis juga memanfaatkan peluang pilkada, pemilu atau pilpres sebagai salah satu perjuangan mereka. Dalam pilpres 2019 misalnya, *Jamaah Anshorusy Syariah (JAS)* dengan tegas menganjurkan untuk menggunakan hak pilih pilpres. Ketua JAS Ustaz Achwan mengingatkan umat Islam untuk berhati-hati dalam memilih pemimpin negara karena umat Islam sudah banyak dirugikan oleh rezim saat itu (2019). Dengan pertimbangan itu maka JAS menganjurkan umat Islam untuk terlibat langsung dalam memilih calon pemimpin yang akan mewakili suara umat Islam. Respons atau sikap senada juga disampaikan oleh kelompok *Jamaah Islamiyah (JI)*. Para Wijayanto sebagai pimpinan JI dalam tahanannya mengeluarkan statemen penting terkait pemilu. Terakhir, mantan petinggi JI Farid Okbah juga mendirikan partai Islam yaitu Partai Dakwah Rakyat Indonesia (PDRI). Terlepas dari fakta bahwa akhirnya Farid OKbah akhirnya ditangkap karena terkait dengan pendanaan JI, pendirian partai politik ini bisa dianggap sebagai bentuk “penerimaan” sebagian kelompok garis keras terhadap sistem demokrasi Indonesia. Fenomena ini selaras dengan Survei Pew (2023) di bawah ini.

Gambar 6: Pemimpin Agama harus mengikuti Pemilu

Most across countries surveyed say religious leaders should vote in elections

% in each country who say religious leaders should ...

	Vote in political elections	Talk publicly about what politicians or political parties they support	Participate in political protests	Be politicians
Cambodia	81%	47%	50%	45%
Indonesia	91	57	57	48
Malaysia	84	66	53	54
Singapore	56	29	18	29
Sri Lanka	70	31	29	21
Thailand	56	35	19	24

Note: Darker shades represent higher values.

Source: Survey conducted June 1-Sept. 4, 2022, among adults in six South and Southeast Asian countries. Read Methodology for details.

“Buddhism, Islam and Religious Pluralism in South and Southeast Asia”

PEW RESEARCH CENTER

Sumber: Pew Research Center (2023)

Terakhir dan tak kalah menarik adalah perubahan sikap ustaz Abu Bakar Ba’asyir. Dalam Pada peringatan 17 Agustus 2022 lalu, beberapa media telah menggambarkan bahwa Abu Bakar Ba’asyir terlibat aktif dalam upacara bendera 17 Agustus bersama dengan para ustaz dan santri di Pondok Ngruki Surakarta merupakan suatu perubahan sikap signifikan. Walaupun upacara bendera itu sudah dilakukan beberapa kali, tapi hormat bendera dan menyanyikan lagu Indonesia Raya pada upacara bendera tahun 2022 itu merupakan peristiwa pertama. Walaupun konfirmasi penulis pada ustaz Abu

didapatkan bahwa penerimaan Ustaz Abu terhadap Pancasila secara substansi tidak banyak berubah; Pancasila versi negara yang mengakomodir berbagai agama dan sistem demokrasi tetap dianggap oleh ustaz Abu bertentangan dengan hukum Islam. Bagaimanapun, penerimaan terhadap Pancasila ini bisa dianggap sebagai perkembangan yang cukup signifikan.

H. Penutup: Masa Depan Antropologi Islam Indonesia

Hadirin yang berbahagia,

Akhirnya, penulis ingin memberi perhatian khusus pada bidang Antropologi Islam yang penulis geluti. Antropologi Islam merupakan disiplin ilmu yang akan subur berkembang di Indonesia, hal tersebut ditunjang dengan kondisi masyarakat Islam Indonesia memiliki potensi anomali tinggi (Kuhn, 1970) sehingga memungkinkan prospek Antropologi Islam akan selalu mendapatkan pengayaan dan dinamika kehidupannya relatif tinggi. Penulis meyakini jika Antropologi Islam ini sangat dibutuhkan bagi para ilmuwan untuk membaca secara jujur bagaimana hubungan tauhid, syariah, imamah, khilafah, ummah, ulama, fikih, hadis, tafsir, tarbiyah, membentuk peradaban yang khas bukan karena terpaksa ber-sejarah belaka, namun karena konteks serta konten yang dibawa oleh Islam itu sendiri. Alquran berisi rancang-bangun peradaban *Rahmatan lil alamin*.

Gencarnya Islamisme global merupakan tantangan dan godaan bagi Islam Indonesia. Seiring dengan modernisasi dan perkembangan teknologi, semangat beragama Muslim

Indonesia juga meningkat secara tajam. Maraknya penggunaan internet dan media sosial telah melewati batas-batas negara dan ideologi. Identitas Islam Indonesia yang sudah membumi sejak abad ke-13 mulai tergerus dengan ideologi Islam trans-nasional (Madinier & Feillard, 2011). Di ranah sosial-politik, beberapa partai dan gerakan Islam muncul sebagai manifestasi gerakan Islam trans-nasional dan mendapatkan pengikut yang signifikan. Sedangkan di ranah budaya, berbagai tradisi Islam asing masuk dan berbaur dengan tradisi Islam lokal. Islamisme sebagai gerakan Islam juga mendapatkan eksistensinya.

Sebenarnya, godaan Islamisme tidak sekedar tuduhan atau asumsi tak berdasar. Selain gerakan Islam berhaluan terorisme, data keterlibatan Muslim Indonesia dalam beberapa kasus Islamisme bisa menjadi bukti nyata. Lebih dari 600 orang Indonesia pergi ke Syria dengan alasan jihad atau “sekedar” hijrah, dan juga tidak sedikit orang yang tertangkap di perbatasan Turki sebagai deportan (The Soufan Center, 2017). Berbagai kasus radikalisme sebagai upaya melawan pemerintah yang sah juga tidak bisa dianggap ringan. Selain itu, perjuangan gerakan Islam di ranah politik juga masih menyisakan kecurigaan beberapa pengamat akan “ketulusan” aspirasi politik sebagian partai Islam. Terakhir, populisme Islam seperti kasus 411 dan 212 serta kemenangan Anis Baswedan sebagai gubernur DKI pada 2017 juga tidak bisa dilepaskan dari fenomena Islamisme di Indonesia.

Di sisi lain, Islam Indonesia yang dikenal berkarakteristik moderat merupakan benteng yang kuat. Secara kultural, nilai-

nilai Islam telah mendarah-daging di berbagai bidang kehidupan bahkan terkadang sulit dipisahkan antara tradisi Islam dan adat lokal. Akulturasi Islam dengan budaya lokal telah menjadikan Islam Indonesia dikenal berbeda dengan Islam Arab. Sebagian kelompok kemudian mem-branding Islam itu dengan Islam Nusantara. Terlepas dari pro-kontra istilah itu, suka atau tidak Islam Indonesia yang telah berabad membumi menjadi brand tersendiri.

Sebenarnya, demokrasi Indonesia masih merupakan proses yang panjang. Sejak runtuhnya Orde Baru 1998, Indonesia memasuki era demokrasi baru. Namun demikian, di ranah sosial berbagai tantangan demokratisasi muncul silih berganti seperti konflik horizontal, intoleransi, dan Islamisme radikal. Setelah konflik di Ambon dan Poso berlalu, beberapa kasus intoleransi antar agama seperti antara Islam dengan Kristen, Ahmadiyah, dan juga Syiah. Saat ini, berbagai kasus Islamisme radikal masih merupakan tantangan yang masih cukup signifikan. Senada dengan Sindhunata (2000), saya juga secara optimis melihat bahwa berbagai konflik horizontal di Indonesia merupakan proses pembentukan kembali (*re-shaping*) negara-bangsa Indonesia; ini semua proses demokratisasi.

Untungnya, sebagian besar Muslim Indonesia tetap mendukung demokrasi. Argumen klasik yang sering dipakai adalah adanya titik temu antara demokrasi dan syura; demokrasi identik dengan demokrasi ala Islam. Di sisi lain, beberapa pengamat berargumen bahwa memang demokrasi bukanlah sistem sosial-politik yang terbaik, namun saat ini sistem ini yang

paling memungkinkan bagi Muslim untuk memperjuangkan Islam. Inilah yang sering disebut sebagai paradoks demokrasi; di satu sisi demokrasi adalah sistem Barat yang mengandung nilai-nilai Barat, tapi di sisi lain sistem ini juga bisa digunakan untuk memperjuangkan nilai-nilai Islam. Kebebasan berpendapat adalah salah satu prinsip penting demokrasi. Kebebasan pers, demonstrasi dll. merupakan mekanisme penyaluran aspirasi dan kepedulian rakyat terhadap politik. Itulah yang sering disebut sebagai *street politics* (politik jalanan).

Hal itu semua menandakan bahwa Indonesia sedang mengalami pos-islamisme. Dalam konteks inilah saya sependapat dengan Asef Bayat (2007) yang menyatakan bahwa demokrasi telah banyak ditolak oleh berbagai kelompok konservatif karena demokrasi telah dipraktikkan secara salah sehingga tidak membawa pada keamanan dan kesejahteraan. Jika demokrasi dilaksanakan dengan benar dan memberikan kepastian keamanan dan kesejahteraan bagi umat Islam, bisa dipastikan bahwa ekstremisme dan radikalisme tidak dianggap sebagai alternatif perjuangan Muslim Indonesia. Oleh karena itu, semangat Islam dan Islamisme yang sedang tumbuh-berkembang di Indonesia ini harus diarahkan pada mekanisme demokrasi (pos-Islamisme). Kita meyakini bahwa Islam memang tidak bisa dipisahkan dari politik karena agama (Islam) sudah mendarah daging dalam masyarakat Indonesia. Hal itu senada dengan fakta bahwa secara kultural agama di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari adat-istiadat atau budaya sesuai pengalaman historis Indonesia. Oleh karena itu, hubungan antara agama dan

negara di Indonesia mengalami dinamika yang sangat hidup dan terus berkembang. Bagi umat Islam, penerimaan terhadap proses demokratisasi inilah yang sesuai dengan kaidah ushul fikih *ma la yutraku kulluhu, ya yudraku kulluhu* (jika tidak bisa dilaksanakan seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya).

Wallahu a'lamu bissowâb.

Hadirin yang saya hormati,

Pencapaian saya hari ini sebagai Guru Besar dalam bidang Antropologi Islam, setelah lebih dari 25 tahun menjadi dosen di Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dapat terwujud karena dukungan serta bantuan banyak pihak. Untuk itu, pertama saya menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kementerian Agama Republik Indonesia yang telah memproses dan menyetujui usulan Guru Besar saya;
2. Rektor Prof. Dr. Phil. Almakin, M.A., Wakil Rektor Bidang I, Prof. Dr. Iswandi Syahputra, S.Ag.,M.Si., Wakil Rektor Bidang II Prof. Dr. Phil. Sahiron, M.A., dan Wakil Rektor Bidang III Dr. Abdur Rozaki, S.Ag.,M.Si. yang telah selalu mendorong dan membantu pengajuan Guru Besar saya;
3. Ketua Senat dan mantan Ketua Senat UIN Sunan Kalijaga, Prof. Kamsi, M.Ag. dan Prof. Siswanto Masruri, M.Ag. serta sekretaris senat Prof. Dr. Maragustam, M.Ag. dan seluruh anggota senat universitas yang dengan caranya masing-masing mengingatkan saya untuk segera mengurus Guru Besar;

4. Kolega-kolega dekan dan Direktur Pascasarjana di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Prof. Dr. Abdul Mustaqim, M.Ag., Prof. Dr. Sri Sumarni, M.Pd., Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, MA., Prof. Dr. Ema Marhumah, M.Pd., Prof. Dr. Makhrus, M.Hum., Dr. Mochammad Sodik, M.Si., dan Dr. Afdawaiza, M.Ag. Terima kasih atas persahabatan, kebersamaan, dan persaudaraan kita selama ini.
5. Dekanat Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, Dr. Ubaidillah, M.Hum., Dr. Uki Sukiman, M.Ag, Dr. Sujadi, MA., semua Guru Besar, Ketua dan Sekretaris Prodi, khususnya Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam dan Sejarah Peradaban Islam, dan semua teman-teman dosen, serta semua tendik di Fakultas Adab dan Ilmu Budaya;
6. Terima kasih juga atas dukungan dari Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Pak Khoirul, Pak Suefrizal, Mas Bagus, dan teman-teman, Ketua dan Sekretaris LPPM serta staf-staf LP2M. Terima kasih banyak untuk panitia yang menyiapkan acara ini, Kabag Fadib bu Asfiah, Bu Tari, Bu Haryati, Bu Ida, Mbak Nurtini, Mbak Ita, dan anggota panitia lainnya.
7. Terima kasih dan *jazakumullah khoirul jaza* pada semua guru-guru saya sejak SD, MTs hingga Madrasah Aliyah khususnya ustaz-ustaz di Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki Surakarta serta semua teman-teman alumni Ma'had Ngruki Trimo *and the genk*, banyak kenangan indah tentang keseruan masa muda dan penanaman nilai-nilai moral di sana.
8. Kepada teman-teman di CISForm, Mbak Prof Irma Fatimah,

Mas Ichwan, Mas Rison, Mas Saptoni, Mbak Prof Alimatul Qibtiyah, Pak Taqin Pak Zikri, Pak Lathif, Fenda, Syafii, mbak Nurul dan yang lain, terima kasih atas persahabatan dan pengalaman penelitian yang kita lakukan bersama.

9. Kepada teman-teman REUMI, teman-teman kongkow, ngopi, dan diskusi A sampai Z setiap hari, teman jalan kaki keliling kampung setiap habis subuh, bersepeda (listrik), dan juga main musik bersama yang telah memberikan pencerahan di kala kehabisan ide menulis. Khususnya Pak Farid dan bu Uyun yang telah menjadi barista bagi grup Reumi ini, terima kasih banyak.
10. Terima kasih untuk semua yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan kehidupan dan karier akademik saya, yang tentu tidak bisa saya sebutkan semua di pidato singkat ini.
11. Pada semua kakak-kakak dan adik-adik tercinta di Jogja, Lamongan, Purbalingga, terima kasih sudah menjadi teman berbagi suka dan duka. Saya juga sampaikan banyak terima kasih bude-bulik dan saudara sepupu Keluarga Besar Warnodisastro, Martowilopo, dan keluarga HM. Zamroni.
12. Terakhir, namun tentu tidak kalah penting, terimakasih pada istri saya, Sari Rohayati, ST. dan 3 anak saya Rifda, Dziky, dan Mirza. Keberadaan, dukungan, dan doa kalian semua adalah tak terhingga bagi saya. Berbagai kesempatan pematangan akademik di dalam dan luar negeri yang saya lakukan tentu berkat dukungan kalian semua.

13. Terakhir dan paling utama kepada kedua orang tua saya, alm. Soewarso dan alm. Rustiyati terima kasih telah mendidik dan memberikan kesempatan bagi saya untuk meraih harapan-harapan saya, doa paling tulus saya selalu untuk mereka almarhum berdua. Terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

REFERENSI

- Ahmed, Akbar S. 1984. *Al-Beruni: The First Anthropologist*, Source: RAIN, Feb., 1984, No. 60, pp. 9-10. Published by: Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland Stable URL: <https://www.jstor.org/stable/3033407>
- _____. 1984. *Defining Islamic Anthropology*, Source: RAIN, Dec., No. 65 (Dec., 1984), pp. 2-4+1 Published by: Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland Stable URL: <https://www.jstor.org/stable/3033364>
- _____. 1986. *Toward Islamic Anthropology: Definition, Dogma and Directions*, Ann Arbor, MI: New Era Publications.
- An-Naim, Abdullahi Ahmed. 2007. *Islam dan Negara Sekuler: Menegosiasikan Masa Depan Syariah*. Terj. Sri Murniati. Bandung: Mizan.
- Asad, Talal. 2009. "The Idea of an Anthropology of Islam Source: Qui Parle," Spring/ Summer 2009, Vol. 17, No. 2, pp. 1-30. Published by: Duke University Press Stable URL: <https://www.jstor.org/stable/20685738>
- Barret, Richard. 2017. *Beyond the Caliphate: Foreign fighters and the threat of returnees*. The Global Strategy Network: The SoufanCenter.
- Bayat, Asef. 2007. *Making Islam Democratic: Social Movemnets and the Post-Islamis Turn*. Stanford: Stanford University Press.

- Bruinessen, Martvan. 2013. *Contemporary Developments in Indonesian Islam: Explaining "Conservative Turn"*. Singapore: ISEAS.
- Davies, Wyn M. 1988. *Knowing One Another: Shaping an Islamic Anthropology*, London and New York: Mansell.
- Evgeniya A. Smoliia, Tatyana V. Satinab, Larisa N. Aleshinac. 2020. "Values as a Factor in Language and Culture," *International Journal of Innovation, Creativity and Change*. www.ijicc.net volume 12, Issue 3.
- Farkhani dkk. 2022. "Converging Islamic and religious norms in Indonesia's state life plurality" di *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, Vol. 12, no. 2, hlm. 421-446.
- Fealy, Greg. White, Sally. (2008). *Expressing Islam: religious life and politics in Indonesia*. edited by Greg Fealy and Sally White. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Firth, Raymond. 1957. *Man and Culture: An Evaluation of the Work of Bronislaw Malinowski*. Routledge: London.
- Hadiz, Vedi R. 2016. *Islamic Populism in Indonesia and the Middle East*. US: Cambridge University Press.
- _____. 2018. "Imagine All the People? Mobilising Islamic Populism for Right-Wing Politics in Indonesia" di *Journal of Contemporary Asia*, 48, 1–18. <https://doi.org/10.1080/00472336.2018.1433225>
- Hamijaya, Nunu A. & Irfan S. Awwas. 2023. *Mejelis Mujahidin Menuju Indonesia Bersyariah: Komitmen Melaksanakan Amanat Konstitusi atas Berkah Rahmat Allah Yang Maha Kuasa*. Yogyakarta: Ma'had AN-Nabawy.

- Hasyim, Syafiq. 2022. *MUI and the History of the Sharia Trajectory in Indonesia*. The Netherland: Brill.
- International Crisis Group. 2002. *Indonesia Backgrounder: How the Jemaah Islamiyah Terrorist Network Operates*. (Jakarta/Brussels: ICG, 2004).
- IPAC, "The Re-Emergence of Jemaah Islamiyah" IPAC Report No. 36, 27 April 2017.
- Khorramdust, Fatemeh, Fahimeh Ansariyan, Hamidreza Rezazadeh, Mahshid Izadi. 2014. "Anthropologists: Islamic And Western Perspective," *Arabian Journal of Business and Management Review* (Nigerian Chapter) Vol. 2, No. 7, p. 154.
- Kuhn, Thomas S. 1970. *The Structure of Scientific Revolutions*, 2nd ed. London: University of Chicago Press Ltd.
- Machmudi, Yon. 2008. *Islamising Indonesian: The rise of Jemaah Tarbiyah and the prosperous justice party (PKS)*. Australia, ANU Press.
- Madinier, Rémy dan Andrée Feillard. 2011. *The End of Innocence? Indonesian Islam and the Temptations of Radicalism*. Singapore: US Press.
- Maslow, A. H. 1943. "A theory of human motivation" di *Psychological Review*, 50(4), 370-96.
- Muhtada, Dani. 2014. *Perda Syariah di Indonesia: Penyebaran, Problem, dan Tantangannya*. Orasi Ilmiah Dies Natalis VII Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 4 Desember 2014.

- Noorhaidi. 2012. *Islam Politik di Dunia Kontemporer Konsep, Genealogi, dan Teori*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2023. *Statistik Perbankan Syariah*. Jakarta: OJK.
- Perrin, R. 1991. "Scheler's Hierarchy of Values" in *Max Scheler's Concept of the Person*. Palgrave Macmillan, London. https://doi.org/10.1007/978-1-349-21399-3_5.
- Pew Research Center. 2011. *The Future of the Global Muslim Population Projections for 2010-2030*. US: Pew Forum.
- _____. 2015. *The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2010-2050*. US: Pew Forum.
- _____. 2023. *Buddhism, Islam, and Religious Pluralism in South and Southeast Asia*. US: Pew Forum.
- Poushter, Jacob. 2016. *The Divide Over Islam and National Laws in the Muslim World: Varied views on whether Quran should influence laws in countries*. US: Pew Research Center.
- Roy, Olivier. 1994. *The Failure of Political Islam*. US: Harvard University Press.
- _____. 2004. *Globalized Islam: the search for a new ummah*. US: Columbia University Press.
- Schäfer, S. (2019). "Democratic Decline in Indonesia: The Role of Religious Authorities" di *Pacific Affairs*, 92(2), 235–255. <https://doi.org/10.5509/2019922235>
- Scheler, Max. 1973. *Formalism in Ethics and Non-formal Ethics of Values* diterjemahkan oleh Manfred S. Frings

- & Roger C. Funk), Northwestern University Press, Evanston.
- Stark, Rodney. 2015. *The Triumph of Faith: Why the World is more Religious than Ever*. New York: Open Road Media.
- Tapper, Richard. 1985. "Islamic Anthropology" and the "Anthropology of Islam" di *Anthropological Quarterly* , Jul., 1995, Vol. 68, No. 3, Anthropological Analysis and Islamic Texts (Jul., 1995), pp. 185-193 Published by: The George Washington University Institute for Ethnographic Research Stable URL: <https://www.jstor.org/stable/3318074>
- Tibi, Bassam. 2016. *Islam dan Islamisme*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Wildan, Muhammad. 2016. "Aksi Damai 411-212, Kesalehan Populer, dan Identitas Muslim Perkotaan Indonesia" di *Maarif: Arus Pemikiran Islam dan Sosial*, Vol. 11, No. 2.
- Wildan, Muhammad. 2017. "Islamism and Democratization in the Post 411 and 212 Rallies of Indonesia" di *Thinking ASEAN*, Issue 19 January 2017.
- Zada, Khamami. 2023. "Sharia and Islamic state in Indonesia constitutional democracy: an Aceh experience" in *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* Vol. 23, No. 1 (2023), pp. 1-17 doi : 10.18326/ijtihad.v23i1.1-17.

CURRICULUM VITAE



A. DATA DIRI

Nama : **Muhammad Wildan**
Tanggal Lahir : 3 April 1971
Tempat Lahir : Sleman
Alamat rumah : Rejodani 04/02 Sariharjo Ngaglik Sleman
Yogyakarta
Pekerjaan : Dosen Universitas Islam Negeri (UIN)
Sunan Kalijaga
Email : muhammad.wildan@uin-suka.ac.id
Orangtua : R. Soewarso, BA. (alm.)
Rr. Rustiyati (alm.)
Istri : Sari Rohayati, ST.
Anak : Rifda Annelis Azzahra (25)
Dziky Dulfikar Rasyid (23)
Mirza Ahsanu Maula (14)

B. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

JENJANG	UNIVERSITAS	BIDANG STUDI	LULUS
S3	National University of Malaysia (UKM)	Anthropologi	2009
S2	Leiden University	Sejarah Islam Indonesia	1999
S1	IAIN/UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Indonesia	Bahasa & Sastra Arab	1995
SLTA	MA Al-Mukmin Surakarta	-	1989
SLTP	MTs Al-Mukmin Surakarta	-	1986
SD	SD Muhammadiyah Domban II	-	1983

C. KARYA-KARYA

JUDUL	JOURNAL/ BUKU	TAHU	PENERBIT
Muslim Minoritas Kontemporer: Sejarah Islam, Tantangan Ekstremisme, Diskriminasi, dan Islamofobia	Buku	2022	IDEA Press
Kontribusi Suara Muhammadiyah Bagi Pengembangan Masyarakat Islam di Indonesia (1915-1957)	<i>Al-Tsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam</i>	2022	UIN Bandung
Mainstreaming Moderation in Preventing-Countering Violent Extremism (P/CVE) Pesantrens In Central Java	<i>QIIS: Qudus International Journal of Islamic Studies</i>	2022	IAIN Qudus

Countering Violent Extremism in Indonesia: The Role of Former Terrorists and Civil Society Organizations	Book Chapter	2022	Palgrave McMillan
Popular Piety in Indonesia: “Aestheticization” and Reproduction of Islam	<i>Ilahiyat Studies</i>	2021	Uludag University Bursa, Turkey
The Persecution of Rohingya Muslims and the Path to Democratization in Myanmar	<i>Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies</i>	2021	PPIM UIN Syarif Hidayatullah
Islamophobia and the Challenges of Muslims in Contemporary European Union Countries: Case Studies from Austria, Belgium, and Germany	<i>Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary of Islamic Studies</i>	2021	UMY Yogyakarta
Religious Diversity and The Challenge of Multiculturalism: Contrasting Indonesia and The European Union	<i>Sunan Kalijaga International Journal of Islamic Civilization</i>	2020	UIN Sunan Kalijaga
Parenting Style And The Level of Islamism Among Senior High School Students In Yogyakarta	<i>Journal of Indonesian Islam</i> Vol. 14. No. 1	2020	UIN Sunan Ampel Surabaya
Resistensi dan Konservatisme Abu Bakar Ba’asyir	Book Chapter	2019	IDEA Press Yogyakarta

Konservatisme dan Ekstremisme di Muhammadiyah: Tantangan Globalisasi Dan Godaan Islamisme	Book Chapter	2019	CISForm UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
“Sistem Produksi Guru Agama & Tantangan Islamisme di Indonesia”	Menanam Benih di Ladang Tandus: Potret Sistem Produksi Guru Agama Islam di Indonesia	2019	CISForm UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Perkembangan Islam di Tengah Fenomena Islamofobia di Jerman	<i>Temali: Jurnal Pembangunan Sosial</i> Vol. 2. No. 2	2019	UIN Sunan Gunungdjati Bandung
Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar): Krisis Ideologi Dan Ancaman Kebangsaan	<i>Temali: Jurnal Pembangunan Sosial</i> Vol. 2 No. 1	2019	UIN Sunan Gunungdjati Bandung
“Islamism and Democratization in the Post 411-212 rallies of Indonesia	Journal of <i>Thinking ASEAN</i> , Issue 19	2017	The Habibie Center
“Aksi Damai 411-212, Kesalehan Populer, dan Identitas Muslim Perkotaan Indonesia”	<i>MAARIF Journal</i> , Vol. 11, No. 2	2016	Ma’arif Institute
“Gerakan Islam Kampus: Sejarah dan Dinamika Gerakan Mahasiswa Muslim”	<i>Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia: Institusi & Gerakan</i>	2015	Ministry of Education

<i>Kamus Politik Islam Indonesia Modern</i>	Buku	2014	UIN Sunan Kalijaga
Narasi dan Politik Identitas: Pola Penyebaran dan Penerimaan Radikalisme dan Terorisme di Makassar Sulawesi Selatan	-	2014	Unpublished
"The End of Innocence? Indonesian Islam and the Temptations of Radicalism"	Book Review: <i>Journal of Ilahiyyat Studies</i>	2013	Bursa Foundation, Turkey
"The Nature of Radical Islamic Groups in Solo"	<i>Journal of Indonesian Islam</i> , Vol. 7, No.1	2013	UIN Surabaya
"Polarisasi masyarakat & Gejala Radikalisme di Pedesaan Indonesia"	<i>Mandatory</i> , Jurnal IRE	2013	IRE Yogyakarta
"Mapping radical Islam in Surakarta: A quest of Muslims' identity"	<i>Contemporary Development in Indonesian Islam: Explaining the "Conservative Turn"</i>	2013	ISEAS, Singapore

D. PENGALAMAN AKADEMIK & ORGANISASI

JABATAN	UNIVERSITAS	TAHUN
Dean at Faculty of Arts & Cultural Sciences	UIN Sunan Kalijaga	2020-present
Lecturer at Faculty of Arts & Cultural Sciences	UIN Sunan Kalijaga	1996-present
Associate Director of Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS)	Gadjahmada University	2019-2020
Lecturer at Center for Religious and Cross-Cultural Studies	Gadjahmada University	2000-present
Director of Center for the Study Islam and Social Transformation (CISForm)	UIN Sunan Kalijaga	2011-present
Secretary to Center for Research and Community Engagement (LPPM)	UIN Sunan Kalijaga	2016-2018
Secretary of Social Work Study Program	UIN Sunan Kalijaga	2004-2005
Lecturer at International Program of Faculty of Economics UII	Indonesian Islamic University (UII)	2000-2004
Lecturer at Faculty of Islamic Studies	Admad Dahlan University (UAD)	2000-2004

E. FELLOWSHIP RISET

JENIS FELLOWSHIP	PENYELENGGARA	TAHUN
Participant of Australian Short Term Award on Understanding Contemporary Terrorism and Developing Policy Responses	Deakin University Australia	2017
Research Fellow	Marburg University Germany	2015
Participant of Higher Education & Leadership Management	Chemonics International USAid	2012
Participant of International Visitor Leadership Program (IVLP)	State Department USA	2010
Research Fellow	ARI NUS Singapore	2007
Research Fellow	ISIM Leiden Belanda	2007

F. PENGALAMAN RISET & ADVOKASI

FOKUS RISET	DONOR	TAHUN
Assessment and Capacity Building for Female Teachers' Resilience Toward Radicalism in Early Childhood Education Institutions	PPIM-UNDP	2020
Religious Literacy among Religious Counselors	BRITISH COUNCIL- Ministry of Religious Affairs	2019
System of Producing Religious Teachers at Islamic Higher Education in Indonesia	PPIM-UNDP	2018

Countering Ultra-Conservative Ideology Thru Animated Movies	PPIM-USAID	2017
Countering Narrative of ISIS Ideology Thru Enlightened Comics	DFAT Australia	2016
Mainstreaming Moderate Islam among Radical Pesantrens in Surakarta: Social Advocacy	DFAT Australia	2014
Social Challenges of Muslims in European Union: The Response of Muslim Communities toward EU Policies	The Ministry of Religious Affairs	2013
The Narratives of Islamism & Radicalism di Makassar, South Sulawesi	National Agency for Anti-Terror (BNPT)	2013

G. KONSULTAN (ADVISOR)

NAMA PROGRAM	PENYELENGGARA	TAHUN
Advisor on Preventing/ Countering Violent Extremism (P/CVE) on Education	Australia-Indonesia Partnership for Justice	2018-2023
Expert on Advisory Team (<i>Paramparapraja</i>) of the Governor of Yogyakarta	Local Government of Yogyakarta	2017-2018

H. EDITORIAL BOARD/PEER REVIEW

NAMA JURNAL/REVIEW	PENYELENGGARA	TAHUN
Peer Review Research Proposals	LPPM IAIN Kediri	2022
Peer Review Research Proposals	LPPM IAIN Salatiga	2022
Peer Review Research Proposals	LPPM IAIN Salatiga	2021
Peer Review Research Proposals	IAIN Surakarta	2020
Peer Review Research Proposals	IAIN Surakarta	2019
Peer Review Research Proposals	LPPM IAIN Salatiga	2019
Peer Review Research Proposals	UIN Jambi Salatiga	2019
Peer Review Research Proposals	LPPM IAIN Salatiga	2018
Editor in Chief of Journal of Al-Jami'ah	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2005-2007

I. PEMBICARA KONFERENSI-SIMPOSIUM

TEMA	PENYELENGGARA	TAHUN
The Mitigation of the Proliferation of Extremism Ideology among Students at Muhammadiyah Universities in Indonesia	ZMO Berlin Jerman	2023
RELIGIOUS AUTHORITY IN THE DIGITAL ERA: Religious Contestation Between Salafi & Moderate Muslims on Websites and Youtube	UIII-KITLV Jakarta	2023
Democratization in The Digital Era Among Conservative Groups in Yogyakarta and Surakarta	ISLAGE (BRIN-UIN)	2023

Policy Analysis: Akselerasi Implementasi RAN PE Di Tingkat Daerah	AIPJ Jakarta	2023
Sulthan’s Mosque of Sulthony Rejodani: Between Preserving Tradition and Contestation of Ideology	ADIA UIN Imam Bonjol Padang	2023
The Phenomena of Islamism and Terrorism in Indonesia	ICRS Yogyakarta	2022
ISLAMISM AND DEMOCRACY: The Trajectory of Theistic Democracy in Muslim Countries	AICONIC- UIN Sunan Kalijaga	2021
Strengthening CSO Networks on P/ CVE in Indonesia	UNODC United States	2018
Strengthening P/CVE on Education in Indonesia	SEARCCT Malaysia	2018
ISIS Messaging in Indonesia	SEARCCT Malaysia	2016
Managing Challenges on the Spreading of Radicalism Teachings in Indonesia thru Education	University of Washington and Indonesian Embassy	2016
Promoting Religious Tolerance and Peace thru Education in Indonesia	Portland State University & Indonesian Embassy	2016
Pesantren, Radicalism, and Terrorism in Indonesia	ISAls, UIN Sunan Kalijaga	2016
Popular Piety in Indonesia: ‘aestheticization’ and reproduction of Islam	CNMS Marburg Uni Germany	2016

Muslim Economic Professionalism and Popular Religious Leaders in Indonesia	Humboldt Uni Germany	2016
Islamism, Radicalism & democratization in Indonesia	FRIAS Freiburg Uni Germany	2015

J. PENGABDIAN MASYARAKAT

JABATAN	LEMBAGA	PERIODE
Pimpinan MUI Sleman	MUI Sleman	2023-2028
Ketua PCM Ngaglik	Muhammadiyah	2015-2022
Pimpinan MUI Sleman	MUI Sleman	2015-2023
Anggota Majelis Tabligh & Tajdid	PP Muhammadiyah	2015-2022
Ketua PCM Ngaglik	Muhammadiyah	2000-2015
Anggota PDM Sleman	PDM Muhammadiyah	2000-2015



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA